

PERKEMBANGAN PENGARUH INGGERIS DAN PERANCIS DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

Ronald NANGOI*

PENDAHULUAN

Bagi negara-negara Pasifik Selatan, Inggris dan Perancis bukan pendatang-pendatang baru. Dalam abad ke-19, kedua negara itu bersaing untuk menjadi kekuatan utama di dunia, dan dalam rangka itu menduduki banyak wilayah termasuk pulau-pulau Pasifik Selatan. Sehubungan dengan itu beberapa kalangan membagi kawasan Pasifik Selatan menjadi dua, yaitu bagian Anglofon dan bagian Frankofon. Namun sesudah Perang Dunia II Inggris mulai menarik diri dari kawasan itu sehubungan dengan menurunnya kekuatan globalnya dan terutama parahnya keadaan ekonomi dalam negerinya. Penarikan diri Inggris ini menjadi titik pangkal proses dekolonisasi di kawasan Pasifik Selatan. Tetapi Perancis bersikap lain dan berusaha mempertahankan beberapa wilayah jajahannya seperti Kaledonia Baru dan Polinesia Perancis, karena mempunyai kepentingan strategis (pemanfaatan wilayah-wilayah jajahan bagi percobaan-percobaan nuklir) dan kepentingan ekonomi (sebagai sumber mineral) di situ.

Tulisan ini membahas perkembangan pengaruh kedua kekuatan Eropa (Perancis dan Inggris) itu di kawasan Pasifik Selatan sehubungan dengan perkembangan kawasan yang cukup menarik dewasa ini akibat usaha-usaha regionalisme negara-negara baru merdeka serta munculnya beberapa kekuatan asing lain seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Jepang, RRC, dan Uni Soviet di kawasan ini.

PENARIKAN DIRI INGGERIS DARI KAWASAN

Karena menguasai banyak wilayah di Pasifik Inggris dikenal sebagai penguasa Pasifik pada abad ke-19. Namun kemudian Inggris melepaskan

*Staf CSIS.

wilayah-wilayah jajahannya satu demi satu. Kemerdekaan Vanuatu dalam bulan Juli 1980 merupakan akhir masa penjajahan Inggeris di Pasifik Selatan.

Penjajahan Inggeris selama lebih dari seabad ini meninggalkan pengaruh-pengaruh di negara-negara bekas jajahannya. Banyak di antara mereka masih menggunakan bahasa, sistem pemerintahan dan perundang-undangan Inggeris, dan mengikatkan diri dengan Inggeris melalui badan kerja sama internasional dan regional seperti Organisasi Persemakmuran (Commonwealth) dan Komisi Pasifik Selatan. Beberapa negara malahan tetap mengakui Ratu Inggeris sebagai kepala negara.

Inggeris Sebagai Penguasa Pasifik Selatan

Masa penjajahan Inggeris di Pasifik Selatan mulai setelah perompak-perompak Inggeris (permulaan abad 18) dan Kapten Cook (antara 1768 dan 1780) menemukan beberapa pulau Pasifik Selatan, serta orang-orang Inggeris bermukim di Australia (1768) dan di Selandia Baru (1840).

Wilayah-wilayah yang diduduki Inggeris sebagai protektorat maupun koloni adalah Fiji (1874), Tokelau (1877), New Guinea (1884), Kepulauan Cook (1888), Kepulauan Gilbert dan Ellice (1892), Kepulauan Solomon (1893), Tonga (1900), dan New Hebrides (1904).

Dengan menguasai wilayah-wilayah ini Inggeris menjadi penguasa utama di Pasifik Selatan. Lagi pula Inggeris menguasai Australia dan Selandia Baru. Penulis Glen Barclay mengatakan: "Tidak seorang pun bisa menyangkal bahwa pendudukan atas Australia dan Selandia Baru telah memberi Inggeris kekuasaan atas wilayah dan sumber-sumber daya yang jauh lebih besar daripada gabungan sisa-sisa kelompok Pasifik."¹

Penjajahan Inggeris atas kawasan Pasifik Selatan, seperti atas kawasan-kawasan lain, berpangkal pada keinginan ekspansionis untuk menguasai dunia di samping kepentingan ekonomi. Sebelum Perang Dunia I, Inggeris berusaha menyaingi negara-negara Eropa lainnya, terutama Perancis dan Jerman, dan berhasil menjadi negara terkuat dan terkaya di dunia dalam abad ke-19.² Glen Barclay mencatat bahwa tidak ada kekuatan Eropa yang mampu menandingi Inggeris di Pasifik sampai ia dikalahkan di Eropa.³ Sejarah juga

¹Lihat Glen Barclay, *A History of the Pacific* (London: Futura Publications Limited, 1978), hal. 108.

²Lihat Arthur Cyr, "British Politics in 1977," *Current History*, Vol. 73, No. 431, Nopember 1977, hal. 155.

³Lihat Glen Barclay, *op. cit.*, hal. 175.

mencatat bahwa negara-negara Eropa tertarik untuk menguasai kawasan Pasifik Selatan karena di situ terjadi perkembangan kegiatan di bidang ekonomi, termasuk penangkapan ikan paus, produksi kayu cendana (sandalwood), kopra, dan fosfat.

Namun menjelang akhir abad ke-19 Inggris mulai menghentikan ekspansinya dan membatasi pengaruhnya. Pada tahun 1886 Inggris dan Jerman mengadakan perjanjian mengenai pembatasan wilayah pengaruh di Pasifik (Barat Daya).¹ Sesudah Perang Dunia II Inggris mulai melepaskan wilayah-wilayah jajahannya, yaitu Tonga (1967), Fiji (Oktober 1970), Kepulauan Solomon (1978), Tuvalu (1978), Kepulauan Ellice (1979), dan Vanuatu (1980).

Penarikan diri Inggris ini berkaitan erat dengan peranan internasionalnya. Setelah Perang Dunia II, pengaruh kekuatan Inggris di dunia mulai berkurang, bukan saja karena tekanan internasional dan aspirasi nasional negara-negara jajahannya untuk merdeka tetapi juga karena masalah ekonomi dalam negeri. Inggris pada waktu itu menghadapi tantangan ekonomi yang serius, antara lain pertumbuhan ekonomi yang lamban, pengangguran, dan inflasi.² Sementara itu, negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Jerman semakin berpengaruh. Inggris akhirnya bahkan menggantungkan diri pada Amerika Serikat. Menjelang 1980, 30 bekas jajahan Inggris di dunia telah memperoleh kemerdekaan.³

Akibatnya, Inggris lebih memperhatikan perkembangan dalam negerinya dan hubungannya dengan Eropa daripada Asia dan Pasifik.

Pengaruh Inggris di Pasifik Selatan

Walaupun Inggris telah menarik diri dari Pasifik Selatan, di kebanyakan wilayah bekas jajahannya pengaruhnya masih sangat terasa, antara lain dalam bahasa, sistem pemerintahan, dan kebudayaan (terutama di Australia dan Selandia Baru).

Kebanyakan negara bekas jajahan ini menggunakan bahasa Inggris, atau Pidgin, sebagai bahasa nasional, di samping bahasa asli mereka. Bahkan organisasi-organisasi regional seperti Komisi Pasifik Selatan dan Forum Pasifik Selatan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar resmi.

¹Lihat Ulrich Schweinfurth, "Melanesia-End of the Colonial Era?" *Aussen Politik*, Vol. 25, No. 1, 1974, hal. 100.

²Lihat Arthur Cyr, *loc. cit.*, hal. 155.

³Lihat M. Margaret Ball, "Regionalism and the Pacific Commonwealth," *Pacific Affairs*, Vol. 46, No. 2, Summer 1973, hal. 1323.

Dalam bidang pemerintahan, beberapa negara menggunakan sistem *Westminster* dan mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negara mereka. Oleh sebab itu penduduk beberapa negara Pasifik seperti Kepulauan Cook, Niue, dan Tokelau adalah warga negara Inggris. Keanggotaan negara-negara pulau dalam Organisasi Persemakmuran juga mencerminkan keterikatan mereka dengan Inggris.

Keterikatan dengan Inggris itu mereka inginkan terutama karena ketergantungan mereka pada bantuan luar negeri. Inggris sendiri tampaknya merasa wajib untuk memberi bantuan ekonomi kepada bekas-bekas jajahannya. Misalnya, Vanuatu masih memperoleh bantuan teknik dan jasa sosial sebesar US\$ 2 juta dan bantuan modal US\$ 6 juta untuk satu tahun merdeka.¹ Organisasi Persemakmuran juga menjamin bantuan dalam jumlah besar apabila dibutuhkan.²

Pengaruh Inggris itu dimungkinkan bukan saja karena faktor ketergantungan tetapi juga karena faktor sejarah. Pendudukan Inggris selama itu sangat mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan negara-negara pulau, sehingga mereka sukar menampilkan keaslian mereka. Faktor sejarah ini juga menimbulkan rasa ketergantungan negara-negara pulau pada Inggris sebagai sumber bantuan utama. Beberapa negara mengusulkan agar Inggris melanjutkan bantuan dana, teknik, dan anggaran. Dalam usia muda, mereka masih sulit untuk memperoleh bantuan dari berbagai sumber.³ Lagipula Inggris berhasil menarik simpati dan kesetiaan negara-negara pulau kepadanya. Oleh sebab itu, beberapa kalangan malahan menolak pemberian kemerdekaan oleh Inggris. Misalnya, salah satu propinsi di Kepulauan Solomon menolak undang-undang kemerdekaan dan memboikot perayaan kemerdekaan, lagi pula terus mengibarkan bendera Inggris selama beberapa bulan sesudahnya.⁴

Rasa simpati negara-negara pulau itu timbul akibat penampilan Inggris sebagai negara yang memperhatikan kepentingan (termasuk pembangunan) mereka. Inggris antara lain menandatangani perjanjian pembatasan percobaan nuklir (*Limited Test Ban Treaty*) pada tahun 1963, dan sejak itu tidak pernah melakukan percobaan nuklir di kawasan Pasifik Selatan, meskipun

¹Lihat Dr. Roderick Alley, "South Pacific - on the Boil," *New Zealand International Review*, Vol. V, No. 1, Januari/Pebruari 1980, hal. 7.

²Lihat pidato Andrew Peacock sewaktu menjabat Menteri Urusan Wilayah Luar tanggal 8 Juni 1972 yang disunting James Griffin, *A Foreign Policy for an Independent Papua New Guinea* (Sydney: Angus and Robertson Publishers, 1974), hal. 140.

³Lihat Gregory E. Fry, "Regionalism and International Politics of the South Pacific," *Pacific Affairs*, Vol. 54, No. 3, Fall 1981, hal. 457.

⁴Lihat *Asia and Pacific 1982*.

Australia mengizinkannya untuk menggunakan fasilitas-fasilitasnya di daerah percobaan peluncuran peluru kendali Woomera (Woomera Missile Test Range).¹

Arti Penarikan Diri Inggeris

Pada dasarnya penarikan diri Inggeris dari Pasifik Selatan ini merupakan sumbangan yang berarti bagi proses dekolonisasi di kawasan itu, karena banyak wilayah jajahan Inggeris memperoleh kemerdekaan. Munculnya negara-negara baru itu mengubah peta politik kawasan Pasifik Selatan secara mendasar.

Sehubungan dengan itu, penarikan diri ini mempunyai arti tertentu bagi beberapa kekuatan lain di kawasan ini. Di satu pihak, kepentingan Perancis untuk tetap bertahan di sana dirugikan akibat proses dekolonisasi Pasifik Selatan. Negara-negara yang baru merdeka mendesak Perancis untuk melepaskan wilayah-wilayah jajahannya agar seluruh kawasan bebas dari penjajahan. Sebagai hasilnya, Vanuatu yang merupakan jajahan bersama Inggeris-Perancis memperoleh kemerdekaan. Di lain pihak, penarikan diri Inggeris ini menguntungkan negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru untuk menggantikan posisi Inggeris, meskipun bukan dalam bentuk penjajahan. Kedua negara ini merasa berkewajiban untuk lebih melibatkan diri dalam kawasan ini, karena memiliki kemampuan di atas negara-negara baru ini. Ketergantungan negara-negara pulau pada bantuan asing menyebabkan mereka mencari bantuan dari Australia dan Selandia Baru.

Akibat penarikan diri Inggeris ini salah satu sumber bantuan asing memang berkurang, walaupun tidak hilang. Selama berkuasa di situ, Inggeris merupakan sumber utama bantuan asing. Misalnya, dalam tahun 1970, Inggeris merupakan sumber bantuan modal bagi Fiji dan Tonga (lebih dari US\$ 3 juta ke Fiji dan hampir US\$ 600.000 ke Tonga), dan bantuan lain di bawah *British Assistance Programme*. Penerima-penerima bantuan utama (lebih dari £ 7,5 juta bantuan keuangan dan teknik pada tahun 1969) adalah Kepulauan Solomon, New Hebrides, Kepulauan Gilbert dan Ellice, serta Tonga.²

Walaupun Inggeris telah berjanji untuk memberi bantuan kepada negara-negara bekas jajahannya, jumlah bantuannya untuk kawasan ini mengalami penurunan setelah tahun 1979 dan 1980 (maksimum £ 10 juta).³ Oleh sebab itu

¹Lihat Wynfred Joshua dan Walter F. Hahn, *Nuclear Politics: America, France, and Britain* (Washington D.C.: The CSIS Georgetown University, 1973), hal. 28.

²Lihat Margaret Ball, *loc. cit.*, hal. 248.

³Lihat Alan Clark, "Vanuatu: Independence but Still the French Connection," *New Zealand International Review*, Vol. V, No. 3, Mei/Juni 1980, hal. 14,

bisa diperkirakan bahwa diversifikasi sumber bantuan asing menjadi alternatif utama bagi kelanjutan program-program pembangunan negara-negara pulau itu setelah merdeka. Bantuan asing penting bagi mereka tidak hanya untuk mengimbangi anggaran negara, tetapi juga untuk rencana-rencana pembangunan semua bentuk.¹

Oleh sebab itu, Australia dan Selandia Baru diperkirakan akan banyak berperan, bukan saja karena merupakan tetangga terdekat tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar.

PERANCIS SEBAGAI PENJAJAH DI KAWASAN

Selain Inggris, Perancis tercatat sebagai negara yang banyak melibatkan diri di Pasifik Selatan dalam bentuk penjajahan atas beberapa wilayah kawasan dan percobaan-percobaan nuklir khususnya di Mururoa. Penguasaan wilayah akibat penjajahan memungkinkan Perancis untuk melakukan kegiatan-kegiatan nuklir. Sebaliknya kepentingan utama dengan persenjataan nuklir lebih mendorong Perancis untuk berusaha mempertahankan diri di kawasan itu. Mururoa merupakan satu-satunya tempat baginya untuk melakukan percobaan nuklir.

Namun proses dekolonisasi di kawasan mempersulit kedudukan Perancis. Negara-negara pulau yang telah merdeka menuntut agar Perancis melepaskan wilayah-wilayah jajahannya dan menghentikan percobaan-percobaan nuklirnya. Beberapa negara di kawasan memperkirakan bahwa penjajahan Perancis akan berakhir dalam setengah dasawarsa mendatang,² meskipun Perancis tidak ingin meninggalkan wilayah-wilayah jajahannya itu dan akan tetap mengadakan kegiatan nuklir di situ.

Kolonialisme Perancis di Kawasan

Penjajahan Perancis di Pasifik Selatan berlangsung sejak abad ke-19. Negara ini secara berturut-turut menduduki Hawaii, Marquesas (1842), Tahiti (1842/1843), Kaledonia Baru (1853), dan New Hebrides (bersama Inggris tahun 1904). Akan tetapi beberapa di antaranya telah dilepaskannya. Sekarang ini Perancis masih menduduki wilayah Kaledonia Baru, Polinesia Perancis, termasuk Wallis dan Futuna.

¹Lihat Ralph Pittman, "The Solomon Islands: A Developing Neo-Colony," *Australian Outlook*, Vol. 31, No. 2, Agustus 1977, hal. 274.

²Lihat Alan Clark, "The French Way: Towards Integration?" *New Zealand International Review*, Vol. V, No. 5, September/Oktober 1980, hal. 18.

Dalam proses dekolonisasi yang berlangsung sejak 1960-an beberapa wilayah jajahan Inggris mendapatkan kemerdekaan seperti Samoa Barat, Kepulauan Cook, Fiji, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Proses ini merangsang wilayah-wilayah jajahan Perancis untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai hasilnya Perancis terpaksa mengikuti jejak Inggris untuk melepaskan wilayah jajahan New Hebrides pada tahun 1980.

Dewasa ini negara-negara Pasifik Selatan berusaha membentuk kesatuan regional dan sehubungan dengan itu mendesak Perancis untuk juga melepaskan sisa wilayah jajahannya. Kesatuan regional dirasakan baru akan sempurna setelah seluruh wilayah merdeka. Mayoritas anggota Forum Pasifik Selatan menuntut agar Perancis melaksanakan hak penentuan diri (dan kemerdekaan) semua wilayah jajahannya. Vanuatu dan Papua Nugini adalah yang paling keras tuntutanannya. Laporan politik luar negeri Papua Nugini menekankan bahwa ia harus mendukung kemerdekaan jajahan-jajahan Perancis di Pasifik Selatan, terutama Kaledonia Baru, karena prinsip dan demi stabilitas jangka panjang di kawasan itu.¹ Seperti Papua Nugini, Vanuatu juga berjuang di tingkat internasional bagi tercapainya kemerdekaan Kaledonia Baru.

Sebagian penduduk asli Kaledonia Baru juga ingin merdeka. Kelompok *Front Kemerdekaan Kanak* melakukan kegiatan anti pemerintah Perancis untuk menuntut kemerdekaan. Sebagai akibatnya timbul konflik karena sebagian masyarakat Kaledonia Baru menginginkan kehadiran Perancis.

Perancis tidak bersedia melepaskan Kaledonia Baru dan Polinesia Perancis karena kedua wilayah ini merupakan taruhan utama di Pasifik Selatan. Kemerdekaan mereka akan berarti bahwa Perancis akan kehilangan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan strategi yang besar baginya. *Pertama*, Kaledonia Baru merupakan salah satu sumber cadangan nikel terbesar di dunia (cadangan nikel Kaledonia Baru selama ini diolah oleh perusahaan Perancis *Societe le Nickel*). *Kedua*, wilayah Perancis di Pasifik Selatan ini memiliki potensi laut yang sangat besar. Selain menguntungkan secara ekonomis (karena potensi ikan laut), wilayah ini menunjang kepentingan Perancis di bidang penelitian dan teknologi laut. Menurut Alan Clark, dengan batas zone ekonomi eksklusif 200 mil Kaledonia Baru dan Polinesia menjadi wilayah ketiga terbesar di dunia. Simposium mengenai sumber-sumber daya laut yang diadakan di Noumea bulan September 1979 menaruh perhatian atas hal itu dan implikasi-implikasinya. Mereka paling tidak bisa merangsang perdagangan, penanaman modal, dan instalasi Perancis jangka panjang. Clark selanjutnya mengatakan bahwa kemampuan keuangan dan

¹*Ibid.*, hal. 20.

teknis serta pengalamannya dalam penelitian laut (ORSTOM) menempatkan Perancis pada suatu kedudukan yang lebih beruntung dalam pengembangan hubungan perdagangan, pengawasan, perhubungan, dan ilmu pengetahuan dengan negara-negara Pasifik.¹ Ketiga dan terpenting, kemerdekaan bagi Kaledonia Baru akan mendorong Polinesia Perancis untuk meningkatkan tuntutan kemerdekaannya. Secara demikian Perancis akan kehilangan tempat percobaan nuklirnya yang paling strategis.

Oleh sebab itu Perancis tidak senang dengan kecaman dan tuntutan negara-negara Pasifik Selatan itu. Ia menilai kecaman mereka sebagai tindakan yang tidak bersahabat. Ia yakin bahwa masalah Kaledonia Baru berbeda dengan New Hebrides (Vanuatu). Penduduk asli Melanesia di Kaledonia Baru hanya merupakan 40% seluruh penduduk, sedangkan mayoritas 60% terdiri atas penduduk keturunan Perancis (Eropa), Indonesia, dan pulau-pulau sekitarnya. Penduduk non-Melanesia ini umumnya mempertahankan kehadiran Perancis seperti terlihat dalam perlawanan mereka terhadap gerakan kemerdekaan penduduk Kanak. *Gerakan Persaudaraan Kaledonia Baru* pada waktu itu menghimbau agar rakyat menunjukkan "hasrat hidup dalam perdamaian dan persaudaraan."²

Kegiatan Nuklir Perancis di Kawasan

Percobaan-percobaan nuklir Perancis di Mururoa menyebabkan negara-negara Pasifik Selatan semakin tidak menyenangkannya. Percobaan nuklir itu dikuatirkan akan mempunyai dampak lingkungan yang mengancam masa depan generasi, kesehatan anak-anak, dan lingkungan akibat pengaruh radio aktif, dan dampak politik yang mengundang perlombaan nuklir di kawasan ini yang akan mengancam keamanan kawasan.

Kegiatan nuklir Perancis ini juga dijadikan alasan negara-negara pulau untuk mendesak Perancis agar mengakhiri penjajahannya di Pasifik Selatan. Suatu petisi dari kalangan pejabat Polinesia Perancis menegaskan: "Kami dipaksa ke dalam suatu keadaan di mana kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengajukan pilihan kepada Perancis ... Pilihan (Perancis) adalah bom di Tahiti. Pemerintah lebih menyukai bom. Sejak hari ini kami berjuang untuk kemerdekaan."³

Negara-negara Pasifik Selatan telah berulang kali mengecam kegiatan nuklir Perancis itu dan menuntut agar ia menghentikan percobaan-percobaan

¹Lihat Alan Clark, *loc. cit.*, hal. 20.

²Lihat *Antara*, 10 Nopember 1981.

³Lihat William E. Tagupa, "Centre D'Experimentation du Pacifique 1963-1973: A Decade of Debate in French Polynesia," *Australian Outlook*, Vol. 28, No. 1, April 1974, hal. 42.

nuklirnya. Bahkan usul "zona bebas nuklir" (nuclear free zone) telah diajukan (sejak 1975) guna melindungi keamanan kawasan. Usul ini didukung oleh Majelis Umum PBB seperti terlihat dalam suatu resolusi yang menyerukan dibentuknya zona seperti itu.¹ Australia, Selandia Baru dan Fiji memboikot perdagangan Perancis dengan kawasan sebagai protes terhadap percobaan nuklir Perancis dasawarsa 1970-an.

Namun Perancis tetap mengadakan percobaan-percobaan nuklir di kawasan. Misalnya pada tahun 1979 Perancis melakukan 9 kali percobaan nuklir di Mururoa (angka dari *National Swedish Defence Research*). Rangkaian kegiatan tahun 1980 menunjukkan peningkatan percobaan dan para ahli strategi pertahanan Perancis memperjuangkan agar kemampuan pertahanan nasional ditingkatkan untuk tahun 1990-an.²

Tekad Perancis untuk terus mengadakan percobaan nuklir di Pasifik Selatan itu kiranya berhubungan erat dengan pertahanan nasionalnya. Berkat kemampuannya di bidang nuklir, yang menunjang pertahanan nasional, Perancis menjadi salah satu negara Eropa yang kuat di dunia. Perancis berusaha mempertahankan kedudukan ini seperti terungkap dalam berbagai pernyataan para pemimpinnya. De Gaulle pernah menegaskan bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya sarana yang dapat menjamin kemerdekaan Perancis dan terpenting secara militer,³ dan menekankan bahwa strategi penangkis Perancis terletak pada potensi nuklirnya.⁴ Giscard d'Estaing menyatakan bahwa ambisi Perancis dalam bidang ekonomi dan pertahanan adalah menjadi pemimpin kelompok yang terdiri atas Jepang, Jerman Barat, dan Inggris. Katanya, Perancis adalah kekuatan nuklir ketiga di dunia dan harus mempertahankan kedudukan itu. Oleh sebab itu Perancis menentang pemikiran untuk membatasi kemampuan nuklirnya.⁵ Dan pemerintah sosialis Francois Mitterrand tidak melakukan perubahan kebijakan di bidang pertahanan, sehingga Perancis tidak hanya mempertahankan sistem penangkis nuklir tetapi juga mengembangkannya. Dalam rangka itu pemerintah akan melanjutkan pembangunan kapal selam nuklir ketujuh dan program percobaan nuklir di Mururoa.⁶

¹Diterima dengan 110 suara lawan 0 dengan 20 abstein (termasuk Uni Soviet, Perancis, Amerika Serikat, dan Inggris). Lihat Keith D. Suter, "The South Pacific-A New Region for Confrontation?" *Marine Policy*, Vol. 6, No. 1, January 1982, hal. 59.

²Lihat Alan Clark, *loc. cit.*, hal. 19.

³Lihat Richard Woyke, "The Process of Change in French Defence Policy," *Aussen Politik*, Vol. 28, No. 1, 1977, hal. 4.

⁴*Ibid.*

⁵Lihat David S. Yost, "French Defense Budgeting: Executive Dominance and Resource Constraints," *Orbis*, Vol. 23, No. 3, Fall 1979, hal. 584.

⁶Lihat *World Armaments and Disarmament SIPRI Year Book 1982* (London: Taylor & Francis Ltd., 1982), hal. 116.

Perancis merasa bahwa kecaman terhadap kegiatan nuklirnya di Pasifik Selatan tidak adil, karena beberapa negara seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, RRC, dan India juga mengadakan percobaan-percobaan nuklir. Inggris dan Amerika Serikat selama 17 tahun setelah Perang Dunia II secara menyolok melakukan berbagai percobaan nuklir di Pasifik tetapi tidak mendapat kecaman dari Australia dan Selandia Baru karena mereka sekutu dalam SEATO dan ANZUS, meskipun kemudian dalam bulan Agustus 1963 bersama Uni Soviet menandatangani *Partial Test Ban Treaty*. Mereka bersepakat untuk tidak melakukan percobaan-percobaan senjata nuklir atau peledakan nuklir lainnya: (a) dalam atmosfer, di luar perbatasan negara, termasuk ruang luar angkasa, atau di dalam air yang merupakan perairan wilayah atau laut bebas; atau (b) dalam setiap lingkungan apabila ledakan-ledakan menyebabkan penyebaran radio-aktif di luar batas wilayah yurisdiksi atau pengawasan suatu negara di mana peledakan nuklir diadakan.¹ Australia juga mengancam Perancis melakukan percobaan nuklir di Pasifik Selatan.

Apalagi Perancis merasa berhak untuk mengembangkan kemampuan nuklirnya guna memperkuat pertahanan nasional di wilayah jajahannya. Menteri Riset dan Teknologi Perancis Jean-Pierre Chevenement sewaktu berkunjung ke Indonesia April 1982 mengatakan: "Percobaan nuklir di perairan Mururoa tidak lepas dari usaha Perancis untuk memperkuat dan mengembangkan persenjataan nuklirnya guna menghadapi kemungkinan pecahnya perang nuklir dalam abad ini. Kemungkinan paling besar perang nuklir akan pecah di Eropa. Saat ini Amerika Serikat dan Uni Soviet masing-masing telah menempatkan sekitar 7.000 senjata nuklir. Jadi jika Perancis mempunyai missile nuklir, itu merupakan hal yang penting; dan sebagai negara yang menganut politik independen, tidak ada negara yang dapat menegur kami kalau kami menjaga keamanan negara kami sendiri."²

Reaksi Perancis

Pada tingkat tertentu usaha negara-negara Pasifik Selatan untuk mengisolasi Perancis dari kawasan bisa berhasil ditinjau dari perkembangan kawasan. *Pertama*, Papua Nugini yang baru merdeka (1975) berusaha untuk mengkoordinasi kepentingan negara-negara pulau Pasifik Selatan dalam suatu aliansi politik guna memudahkan perjuangan mereka di PBB dan organisasi-

¹Lihat Philip Hay, "An End to Nuclear Testing: Whistling in the Wind?" *New Zealand International Review*, Vol. VI, No. 3, Mei/Juni 1981, hal. 29.

²Lihat *Sinar Harapan*, 10 April 1982.

organisasi yang lain. *Kedua*, sewaktu usaha itu berkembang, Australia dan Selandia Baru semakin merasa wajib untuk memihak pulau-pulau ini, sehingga Perancis semakin terisolasi. *Ketiga*, kelompok-kelompok pejuang kemerdekaan cenderung menerima dukungan yang lebih besar dari kawasan di mana Vanuatu telah merdeka. Munculnya Vanuatu sebagai suatu negara telah mendorong Vanuatu Pati untuk bersikap amat anti Perancis dan merangsang kelompok-kelompok tersebut untuk merdeka.¹

Dalam keadaan yang cukup sulit, Perancis tampaknya berusaha mengkonsolidasikan diri di kawasan. Selain terus mengadakan percobaan nuklir, Perancis berusaha menarik hati negara-negara Pasifik Selatan antara lain dengan menonjolkan bantuan luar negeri dan kerja sama dengan mereka. Arus bantuan Perancis menduduki tempat kedua setelah Australia bagi kawasan. Misalnya pada tahun 1977, jumlah bantuan Perancis adalah US\$ 265,3 juta dan bantuan Australia US\$ 270,8 juta. Bantuan Perancis ini tidak ditolak oleh negara-negara kawasan karena mereka umumnya sangat membutuhkan bantuan luar negeri bagi pembangunan.

Sementara itu Perancis juga meningkatkan kerja sama dengan mereka (termasuk Australia dan Selandia Baru) sebagaimana dinyatakan seorang duta besar Perancis di Selandia Baru: "Karena keterlibatan Amerika dan Inggris telah berkurang di kawasan ini, tanggung jawab Perancis untuk hubungan yang lebih erat dengan Selandia Baru dan Australia dalam tugas untuk pembangunan regional diakui semakin disukai."²

Tindakan yang diambil Perancis berkenaan dengan pembangunan wilayah adalah reformasi di bidang sosial dan ekonomi, yang dikenal sebagai *Dijoud Plan*. Reformasi yang dilaksanakan sejak 1979 itu diharapkan akan mengurangi tekanan dalam bentuk rasial dan tuntutan akan kemerdekaan serta menguntungkan penduduk asli, karena menekankan stabilisasi dan diversifikasi ekonomi, modernisasi kebijakan sosial demi kemajuan bangsa Melanesia dan *landreform*.³

¹Lihat Gregory E. Fry, "Regionalism and International Politics of the South Pacific," *Pacific Affairs*, Vol. 54, No. 3, Fall 1981, hal. 479.

²Lihat Alan Clark, *loc. cit.*, hal. 20.

³Lihat Alan Clark, "New Caledonia and the New France," *New Zealand International Review*, Vol. VI, No. 5, September/Oktobre 1981, hal. 25.

PENUTUP

Penjajahan negara-negara Barat yang cukup lama di Pasifik Selatan setidaknya-tidakny menyebabkan ketergantungan di kalangan negara-negara yang baru merdeka. Meskipun telah merdeka, mereka masih menginginkan agar Inggris meneruskan bantuan luar negerinya. Di masa mendatang, Australia dan Selandia Baru kiranya dapat menggantikan peranan Inggris, karena memiliki kemampuan yang lebih besar daripada negara-negara pulau tersebut. Selain itu, penjajahan menyebabkan negara-negara Pasifik Selatan kehilangan identitas, seperti tercermin dalam bahasa, sistem perundang-undangan dan pemerintahan mereka. Oleh sebab itu mereka berusaha membentuk identitas regional sebagai bangsa Pasifik Selatan.

Namun penarikan diri Inggris mempunyai arti penting bagi kawasan Pasifik Selatan. Hampir seluruh Pasifik Selatan telah memperoleh kemerdekaan. Akibatnya kedudukan Perancis di situ agak terpojok, karena negara-negara yang baru merdeka mulai menekannya untuk melepaskan wilayah-wilayah jajahannya yang vital, yaitu Kaledonia Baru dan Polinesia Perancis. Negara-negara Pasifik Selatan itu semakin optimis dengan usaha-usaha regionalisme mereka, meskipun mereka masih banyak bergantung pada negara-negara maju.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:



ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—



THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—



BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.



Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah: **PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS**
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

...the ...

